

Faktor-Faktor Pendorong Polandia Menentang *The European Green Deal* Tahun 2019-2023

Nela Elfita Fitri¹, Apriwan², Diah Anggraini Austin³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: ¹nelaelfita19@gmail.com, ²apriwan@fisip.unand.ac.id,
³diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id

Abstract

In 2019, the European Commission established an ambitious policy initiative regarding environmental change issues called the European Green Deal. The aim of this policy is to achieve zero emissions by 2050 and make Europe as the first climate neutral continent by that year. All member states had to adopt the goals, and Poland was the only member state opposes that policy. This research aims to explain the factors driving Poland's opposition to the European Green Deal in 2019-2023. These driving factors will be explained using the theory of Foreign Policy Decision Making by William D. Coplin. Coplin explained that a country's decisions can be influenced by several determinant factors, namely the international context, domestic politics, and economic and military stability. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis research. This research found that Poland's decision to oppose The European Green Deal was caused by Poland's energy and economic security, international dynamics and euroskepticism, as well as Poland's domestic political instability.

Keywords: Coal, Energy Security, European Union, Green Transition, Poland.

Pendahuluan

Pada tahun 2019, Komisi Eropa menetapkan sebuah inisiatif kebijakan yang ambisius terkait dengan isu perubahan lingkungan yang disebut dengan The European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa. Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral iklim (nol emisi) pada tahun 2050. Kesepakatan Hijau tersebut juga merupakan komitmen publik pertama di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 1990 (Diana 2023). Untuk membuat tujuan tersebut mengikat secara hukum, Komisi Eropa kemudian mengusulkan Undang-Undang Iklim Eropa atau *The European Climate Law*, yang menetapkan bahwa semua bidang

kebijakan UE harus berkontribusi untuk mencapai tujuan dalam Kesepakatan Hijau (Norton Rose Fulbright 2021).

Bidang utama yang menjadi pilar dari Kesepakatan Hijau Eropa adalah kebijakan energi dan kebijakan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan tujuan Kesepakatan Hijau yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah pola ekonomi dan konsumsi energi Eropa (Leonard 2021). Kesepakatan Hijau nantinya akan membawa UE kepada proses green transition yang merupakan peralihan menuju perekonomian yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, UE mengharuskan negara anggota mengambil langkah tegas untuk segera mendekarbonisasi ekonomi mereka. Negara anggota harus mengadopsi Kesepakatan Hijau sebagai tujuan nasional mereka, kemudian memperbarui kebijakan nasional terkait energi dan iklim mereka untuk mencapai tujuan nol emisi. Meskipun didukung oleh semua negara anggota, hanya Polandia yang memilih untuk tidak mengadopsi tujuan netralitas iklim sebagai tujuan nasionalnya (Menkes dan Suska 2021a). Pemerintah Polandia merasa tidak realistis bagi negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dalam Kesepakatan Hijau pada waktu yang ditentukan.

Pertimbangan awal Polandia mengenai tujuan untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 adalah adanya keharusan proses transisi energi yang besar di negara tersebut. Polandia harus mengurangi emisi sebesar 17,7%, Komisi Eropa telah memperkirakan bahwa setidaknya 25% dari konsumsi energi Polandia harus berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030 (DG CLIMA 2022). Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan netralitas iklim, terdapat dua perubahan utama dalam kebijakan energi Polandia yang harus diperkenalkan, yaitu menghentikan penggunaan batu bara keras dan lignit sebagai sumber energi utama, serta meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dalam komposisi energi nasional (Tomaszewski 2020). Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Polandia secara keseluruhan.

Menanggapi pertimbangan negara-negara yang perekonomiannya bergantung kepada bahan bakar fosil seperti Polandia, UE tidak hanya mengeluarkan regulasi yang mengikat dengan target pengurangan emisi yang ketat. Kesepakatan Hijau juga dilengkapi dengan skema pembiayaan yang besar. Komisi Eropa mengadopsi rencana investasi sebesar 100 miliar euro (\$11 miliar) untuk mencapai tujuan netralitas iklim. Skema pembiayaan tersebut bertujuan untuk mendukung wilayah Eropa yang terkena dampak paling besar selama proses transisi hijau, seperti wilayah penambangan dan industri batu bara di Jerman, Polandia, Slovakia, dan negara-negara di wilayah Eropa Timur lainnya (Enel Group 2023). Polandia merupakan penerima terbesar pendanaan tersebut diikuti oleh Jerman dan Romania (European Commission 2021).

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat adanya ketegangan yang terjadi antara UE yang merupakan badan otonom di Eropa dan Polandia sebagai salah satu negara anggota dari organisasi supranasional tersebut terkait kebijakan lingkungan yaitu Kesepakatan Hijau Eropa. Meskipun Komisi Eropa telah menetapkan pembiayaan yang besar bagi Polandia dalam proses transisi hijau, tetapi Polandia masih menentang Kesepakatan Hijau Eropa dan bahkan menggugat beberapa regulasi di dalam Kesepakatan Hijau tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu, apa faktor yang mendorong Polandia menentang The European Green Deal.

Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, terdapat tiga tinjauan pustaka yang berasal dari artikel jurnal. Literatur pertama merujuk pada tulisan dari Annette Bongardt dan Francisco Torres yang berjudul “The European Green Deal: More than an Exit Strategy to the Pandemic Crisis, a Building Block of a Sustainable European Economic Model”. Annette dan Francisco dalam tulisan ini menjelaskan analisis terkait kebijakan lingkungan UE yaitu The European Green Deal yang dianggap memiliki inisiatif lain terlepas dari inisiatif ekologis. Artikel ini memberikan narasi yang koheren tentang iklim dan konsep “keberlanjutan” yang mencakup

semua kebijakan lain yang sebelumnya tidak terkait. Narasi dari inisiatif pertumbuhan hijau dalam artikel tersebut akan membantu penelitian ini untuk memahami kepentingan yang ingin dicapai UE dalam Kesepakatan Hijau Eropa.

Literatur selanjutnya adalah artikel jurnal yang berjudul “The Polish road to the new European Green Deal challenges and threats to the national energy policy” yang ditulis oleh Krzysztof Tomaszewski. Krzysztof dalam tulisan tersebut menjelaskan analisisnya terkait sektor energi Polandia dalam konteks untuk mencapai tujuan netralitas iklim UE pada tahun 2050. Artikel jurnal tersebut memaparkan bahwa terdapat dua bidang kepentingan strategis Polandia, yaitu sektor batu bara yang harus dikurangi, serta sektor energi terbarukan yang harus ditingkatkan untuk mencapai netralitas iklim. Artikel jurnal ini berkontribusi dalam penelitian ini dalam memahami tantangan penerapan Kesepakatan Hijau Eropa dengan realitas ekonomi, sosial, dan teknologi Polandia. Tantangan tersebut yaitu, ketergantungan Polandia pada bahan bakar fosil terutama batu bara keras dan lignit, kemudian tingkat penerapan energi terbarukan atau Renewable Energy Source (RES) yang tidak memadai dalam komposisi energi nasional Polandia.

Literatur ketiga merujuk pada artikel jurnal yang berjudul “The Energy Transition in the Visegrad Group Countries” yang ditulis oleh Ewelina Kochanek. Tulisan Kochanek memaparkan analisisnya terhadap transisi energi di negara-negara kelompok Visegrad. Negara-negara kelompok Visegrad adalah negara-negara aliansi dari empat negara Eropa Tengah, yaitu Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slovakia. Tulisan ini melihat bagaimana keadaan keamanan energi saat ini dari negara kelompok Visegrad, serta tindakan apa yang diambil oleh negara kelompok Visegrad tersebut untuk mematuhi persyaratan Kesepakatan Hijau Eropa. Artikel ini akan membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana transisi energi di Polandia berlangsung. Melihat sifat multidimensi dari kebijakan energi di mana Polandia merupakan satu-satunya negara Visegrad yang tidak memiliki energi nuklir dalam komposisi energinya.

Rangkaian aktivitas yang mencari, membaca, menelaah penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Direkomendasikan menggunakan artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal nasional/internasional yang bereputasi. Disusun dalam bentuk paragraf yang memuat uraian ringkasan isi literatur, kontribusi terhadap penelitian dan ruang yang akan diisi oleh peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis yang akan menganalisis faktor-faktor pendorong Polandia menentang The European Green Deal pada tahun 2019-2023. Data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka ini bersumber dari buku, dokumen, laporan resmi, artikel jurnal, atau analisis mengenai isu terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis memberi batasan penelitian ini dari tahun 2019 hingga 2023.

Penelitian deskriptif analisis ini dianalisis menggunakan teori Foreign Policy Decision Making yang dijelaskan oleh William D. Coplin. Teori tersebut menjelaskan bagaimana negara merespon isu eksternal dan memberlakukan kebijakan luar negerinya. Teori tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang menentukan arah kebijakan atau respon yang diambil oleh suatu negara. Faktor determinan pertama dilihat dari konteks internasional di mana sifat sistem internasional sangat mempengaruhi keputusan suatu negara. Faktor determinan kedua yaitu politik dalam negeri yang melihat bahwa stabilitas sistem politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Faktor determinan ketiga adalah kondisi ekonomi dan militer yang melihat bahwa kondisi-kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan politik luar negeri dengan memberikan dukungan dan tuntutan kepada para pengambil keputusan.

Hasil dan Pembahasan

Polandia cenderung memberikan respon yang negatif terhadap Kesepakatan Hijau Eropa. Pada awal Kesepakatan Hijau diperkenalkan oleh Komisi Eropa, Polandia bersama dengan beberapa negara di wilayah Eropa Tengah lainnya menolak untuk menyetujui Kesepakatan Hijau tersebut. Polandia kemudian mengubah pertimbangannya ketika pandemi Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi di mana Polandia menandatangani pernyataan bersama Dewan Eropa yang secara tidak langsung menunjukkan komitmen terhadap proses transisi hijau, kemudian memperbarui kebijakan energinya agar sesuai dengan tujuan Kesepakatan Hijau. Pertimbangan-pertimbangan Polandia tersebut didasari oleh skema bantuan keuangan yang disediakan oleh UE. Hal tersebut terlihat dari pernyataan bersama Dewan Eropa yang juga mencakup bantuan perbaikan perekonomian pasca pandemi, serta bantuan keuangan Covid-19 yang seluruh mekanismenya dikaitkan dengan tujuan untuk mencapai netralitas iklim.

Oleh karena itu, komitmen Polandia terkesan sebagai agenda politik untuk mencapai kepentingan tertentu. Komisi Eropa juga telah beberapa kali mengkritik Polandia terkait kebijakannya yang kurang ambisius serta respon Polandia yang menunda berkomitmen terhadap target waktu yang ditetapkan UE. Respon negatif Polandia terlihat jelas ketika negara tersebut memblokir dan menggugat beberapa regulasi di dalam Fit for 55 package ke Pengadilan Tinggi Eropa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi respon negatif Polandia terhadap Kesepakatan Hijau Eropa. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon Polandia tersebut akan dijelaskan menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin menggunakan beberapa indikator, yaitu konteks internasional, politik domestik, dan kapabilitas ekonomi dan militer.

A. Konteks Internasional

1. Euroskeptisisme Polandia Terhadap Uni Eropa

Sejak awal keanggotaannya di UE pada tahun 2004, Polandia cenderung berusaha mengembangkan kebijakan UE yang lebih koheren. Hal tersebut terlihat dari Polandia yang seringkali mengubah posisinya antara pendekatan yang lebih kolaboratif dan pendekatan yang konfrontatif seperti menggunakan hak veto untuk memblokir atau membatalkan keputusan dan ketetapan UE terkait isu-isu yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Salah satu isu yang menjadi kepentingan Polandia dari awal aksesinya adalah mengenai keamanan energi. Sejak awal, Polandia telah bersikap skeptis terhadap kebijakan lingkungan UE yang disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap sektor batu bara. Polandia juga telah melakukan lobi untuk menghalangi penutupan batu bara dengan alasan ketahanan energi. Namun batu bara merupakan salah satu sumber energi yang paling menimbulkan polusi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan gagasan menjadikan UE sebagai garda terdepan pengembangan energi ramah lingkungan (Karolewski 2018a).

Menurut beberapa ahli, dinamika hubungan Polandia dengan UE yang diwarnai dengan beberapa pertentangan hingga tuntutan yang berakhir dengan sanksi ekonomi telah memperlihatkan efek soft euroscepticism atau euroskeptisisme lunak yang tengah terjadi. Polandia telah menunjukkan euroskeptisisme terhadap UE meskipun tidak sefrontal yang dilakukan Inggris. Euroskeptisisme Polandia tidak menunjukkan penolakan terhadap integrasi Eropa atau menunjukkan keberatannya terhadap keanggotaan UE. Namun, Polandia menunjukkan kekhawatirannya terhadap beberapa bidang kebijakan UE seperti Kesepakatan Hijau Eropa yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut (Karolewski, et.al, 2018b).

2. Perang Rusia dan Ukraina

Perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan pemutusan ekspor sektor energi dari Rusia kepada UE. Hal tersebut juga telah menyebabkan krisis energi di beberapa negara UE khususnya Polandia di mana hampir 75% batu bara yang diimpor oleh Polandia berasal dari Rusia (Olszewski 2022). Pemerintah Polandia mengatakan bahwa pemutusan hubungan impor energi dengan Rusia akan menyebabkan Polandia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan energinya, terutama dalam sektor energi listrik yang dihasilkan dari batu bara. Meninggalkan industri batu bara juga dianggap sebagai perubahan yang berbahaya dan terlalu drastis dalam perekonomian Polandia di masa perang yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Polandia tidak dapat menutup tambang batu bara untuk beberapa dekade ke depan dan tidak dapat memenuhi target iklim UE pada tahun 2030.

B. Politik Domestik

1. Ketidakstabilan Politik Dalam Negeri Polandia

Sulitnya proses transisi hijau di Polandia juga disebabkan oleh kebijakan energi nasional yang tidak koheren dengan tujuan transisi hijau. Kebijakan energi Polandia hanya bersifat instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sementara itu, arah politik Polandia cenderung menentang regulasi UE, terutama kebijakan energi dan iklim dengan alasan untuk melindungi “kedaulatan” negara tersebut (Szymon 2023). Pada tahun 2021, pemerintah Polandia mengadopsi kebijakan energi nasional yakni Poland’s Energy Policy Until 2040 (PEP2040) yang telah mengadopsi instrumen Kesepakatan Hijau, namun kebijakan yang terkandung di dalamnya dinilai tidak ambisius oleh Komisi Eropa. PEP2040 bahkan mengalami banyak kemunduran dalam proses pengimplementasiannya.

2. Posisi Serikat Penambang yang Kuat dalam Pemerintahan Polandia

Selain hambatan dari elit politik yang berkuasa di Polandia di mana pemerintah tidak memperhitungkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi berbasis batu bara dan membuat kebijakan lingkungan yang kurang tegas terkait hal tersebut, terdapat juga hambatan dari kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Kelompok kepentingan tersebut adalah serikat penambang (miner's union) yang merupakan lobi ekonomi yang sangat kuat di Polandia. Hal tersebut terlihat dari gagalnya rencana pemerintah untuk menutup dua tambang batu bara tua di Polandia akibat aksi turun ke jalan yang dilakukan serikat penambang (Zientara 2009). Oleh karena itu, penolakan mereka terhadap transformasi energi merupakan faktor penting yang menghalangi upaya penerapan Kesepakatan Hijau Eropa (Mrozowska 2021).

C. Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Energi

1. Peran Penting Batu Bara dalam Sektor Perekonomian dan Keamanan Energi Polandia

Keamanan energi merupakan faktor pendorong terbesar Polandia menentang Kesepakatan Hijau Eropa. Hal tersebut disebabkan oleh keamanan energi Polandia yang sangat bergantung terhadap sektor batu bara. Hal ini terlihat dari 75% sumber pembangkit listrik dan panas Polandia yang berasal dari batu bara. Selain itu, sektor batu bara juga merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan di Polandia, terutama di wilayah regional yang menjadi pusat industri. Silesia merupakan salah satu wilayah regional Polandia yang memiliki tantangan transisi hijau paling sulit, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga di seluruh UE. Silesia juga telah tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran terendah di Polandia. Sektor batu bara memperkerjakan sekitar 73.000 pekerja (International Energy Agency 2022). Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2030 penutupan tambang batu bara dan

pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh UE dapat menyebabkan hilangnya 160.000 pekerjaan (Alves 2018).

2. Biaya Transformasi Energi dan Sosio-Ekonomi yang Besar

Mengadopsi dan mengimplementasikan Kesepakatan Hijau Eropa membutuhkan biaya transformasi sosio-ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun telah dilengkapi dengan skema bantuan keuangan yang besar, namun pembiayaan tersebut dinilai tidak efektif. Polandia beranggapan bahwa regulasi di dalam Kesepakatan Hijau Eropa khususnya Fit for 55 package hanya menguntungkan negara-negara dengan pendapatan domestik nasional tertinggi atau “negara kaya” di UE. Para politisi Polandia mendefinisikan Kesepakatan Hijau sebagai agenda “Komunisme Hijau”. Kekhawatiran utama pemerintah Polandia adalah bahwa UE akan bertindak sebagai penentu laju transisi hijau dan negara-negara anggota yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara akan kesulitan untuk mengikutinya (Aleksandra 2023). Sementara itu, Polandia berada di titik awal yang sulit dalam proses transisi energi. Hambatan terbesar Polandia dalam mencapai tujuan netralitas iklim adalah titik awal yang sulit menuju proses transisi dan dekarbonisasi. Strategi alternatif yang dapat dilakukan Polandia untuk menghentikan industri batu bara tanpa mengalami kerugian yang besar adalah mengembangkan energi nuklir dan tenaga angin seperti yang telah dilakukan oleh Jerman dan Inggris sebagai negara yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam meninggalkan perekonomian berbasis batu bara (Beyond Fossil Fuels 2023).

Mengembangkan energi nuklir sebagai energi alternatif dinilai cukup efektif bagi Polandia untuk menghentikan industri batu bara. Pemerintah telah menyatakan persetujuan mengenai strategi alternatif tersebut dan telah merencanakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan mulai beroperasi pada tahun 2033 dan tahun 2043. Namun, membangun dan mengembangkan industri nuklir memerlukan dana dan investasi yang besar. Jika dibandingkan dengan Jerman dan Inggris, pendapatan nasional Polandia

jauh lebih rendah. Meskipun telah bergabung dengan UE, Polandia saat ini masih tergolong sebagai negara anggota dengan pendapatan terendah (peringkat ke-22 dalam kategori PDB riil per kapita dan ke-20 dalam kategori PDB per kapita PPS). Oleh karena itu, tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah membatasi kemampuan investasi perusahaan-perusahaan Polandia (Menkes 2021).

Kesimpulan

Kesepakatan Hijau Eropa atau The European Green Deal merupakan seperangkat instrumen kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral iklim pada tahun 2050. Kesepakatan Hijau Eropa dilengkapi dengan insiatif kebijakan yang kompleks, regulasi yang bersifat mengikat dan mengatur seluruh bidang kebijakan (tidak hanya terkait dengan isu lingkungan), serta dilengkapi dengan bantuan pembiayaan yang besar. Komisi Eropa telah menetapkan bahwa seluruh negara anggota harus mengadopsi tujuan di dalam Kesepakatan Hijau tersebut ke dalam tujuan nasional mereka, meskipun implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara. Polandia merupakan satu-satunya negara anggota yang dengan tegas menolak serta menentang Kesepakatan Hijau Eropa. Penolakan Polandia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, berdasarkan konteks internasional, respon Polandia dalam menentang Kesepakatan Hijau Eropa dipengaruhi oleh hubungan politik negara tersebut dengan Uni Eropa yang cenderung tidak stabil serta perang antara Rusia dan Ukraina yang tengah terjadi. Dinamika hubungan Polandia dengan UE yang diwarnai dengan beberapa pertentangan hingga tuntutan yang berakhir dengan sanksi ekonomi telah memperlihatkan efek soft euroscepticism atau euroskeptisisme lunak yang tengah terjadi. Polandia telah menunjukkan euroskeptisisme terhadap UE meskipun tidak sefrontal yang dilakukan Inggris. Euroskeptisisme Polandia tidak menunjukkan penolakan terhadap integrasi Eropa atau menunjukkan keberatannya terhadap keanggotaan UE. Namun,

Polandia menunjukkan kekhawatirannya terhadap beberapa bidang kebijakan UE seperti Kesepakatan Hijau Eropa yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Polandia berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan melindungi sektor energi.

Kedua, berdasarkan politik domestik, keamanan energi Polandia yang tidak stabil mempengaruhi keadaan politik negara tersebut saat ini. Penolakan Polandia terhadap pengurangan produksi dan konsumsi batu bara datang dari berbagai pihak, yaitu perusahaan batu bara, serikat penambang, masyarakat sipil dan pemerintah serta koalisi mereka. Penolakan tersebut disebabkan oleh kemungkinan hilangnya bisnis, pengalaman negatif dengan perubahan struktural di masa lalu, ketakutan akan kenaikan harga energi dan kekhawatiran mengenai keamanan energi, serta potensi pengangguran di wilayah yang hampir seluruhnya bergantung pada batu bara.

Ketiga, berdasarkan stabilitas ekonomi Polandia di mana penolakan negara tersebut terhadap Kesepakatan Hijau Eropa disebabkan oleh peran sektor batu bara yang sangat besar terhadap perekonomian Polandia serta dalam komposisi keamanan energi negara tersebut. Batu bara telah menjadi sumber pendapatan beberapa wilayah tambang terbesar di Polandia seperti wilayah Silesia Atas dan Bawah, sehingga penutupan batu bara dapat menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Sementara itu, batu bara juga berperan penting dalam komposisi energi Polandia di mana saat ini sekitar kurang lebih 70% sumber energi listrik dan pemanas di negara tersebut bergantung kepada batu bara. Peralihan menuju penggunaan energi terbarukan membutuhkan biaya transformasi sosio-ekonomi yang besar. Kurangnya tingkat investasi swasta serta keadaan ekonomi Polandia yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara di wilayah Eropa Barat telah menjadi hambatan besar bagi negara tersebut untuk mengadopsi Kesepakatan Hijau Eropa.

Daftar Pustaka

- Adam, Ambroziak & Menkes, Jerzy & Suska, Magdalena & Błaszczuk-Zawiła, Marzenna & Dąbrowski, Łukasz & Szypulewska-Porczynska, Alina & Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta. 2021. "The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: Implications for Poland" In: *The Economic and Legal Impact of COVID-19*, London & New York: Routledge.
- A. Bongardt, and Torres, F. 2022. "The European Green Deal: More than an Exit Strategy to the Pandemic Crisis, a Building Block of a Sustainable European Economic Model", *Journal of Common Market Studies*, Vol. 60, <https://doi.org/10.1111/jcms.13264>
- Hajda, Lubomyr A. 2024. "The Russian invasion of Ukraine", *Britannica*, May 17, 2023. <https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Russian-invasion-of-Ukraine>
- Hanna Brauers, and Pao-Yu Oei. 2020. "The political economy of coal in Poland: Drivers and barriers for a shift away from fossil fuels", *Energy Policy* 144. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111621>
- Kochanek, Ewelina. 2021. "The Energy Transition in the Visegrad Group Countries". *Energies*, 14: 2212. <https://doi.org/10.3390/>
- Krzysztof, Tomaszewski. 2020. "The Polish road to the new European Green Deal: challenges and threats to the national energy policy", *Polityka Energetyczna Energy Policy Journal*.
- Leonard Mark, Jean Pisani-Ferry, Jeremy Shapiro, Simone Tagliapietra, and Guntram Wolff. 2021. "The Geopolitics of the European Green Deal." *European Council on Foreign Relations*. <https://www.jstor.org/stable/resrep29130>.
- Mrozowska, Sylwia, Jan A. Wendt, and Krzysztof Tomaszewski. 2021. "The Challenges of Poland's Energy Transition" *Energies* 14, no. 23: 8165. <https://doi.org/10.3390/en14238165>
- Kondracki, Jerzi A. 2024. "Economy of Poland", *Britannica*, May 17, 2024. <https://www.britannica.com/place/Poland/Finance>
- Krzysztosek, Aleksandra. 2023. "Polish ruling party head slams EU's Fit for 55 plans, says only richest states benefit", *Euractiv*, April 23, 2023. <https://www.euractiv.com/section/politics/news/polish-ruling-party-head-slams-eus-fit-for-55-plans-says-only-richest-states-benefit/>
- Olszewski, Michał. 2022. "Poland and the energy costs of the Russian war in Ukraine", *Energy Transition: The Global Energiewende*, September 01, 2022. <https://energytransition.org/2022/09/poland-and-the-energy-costs-of-the-russian-war-in-ukraine/>
- Rankin, Jennifer. 2019. "European Green Deal to press ahead despite Polish targets opt-out". *The Guardian*, December 13, 2019. <https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/13/european-green-deal-to-press-ahead-despite-polish-targets-opt-out>

- Steinhoff, Janusz. 2022. "How to overcome the energy crisis in Poland?", Center for Social and Economic Research, December 20, 2022. <https://www.case-research.eu/en/how-to-overcome-the-energy-crisis-in-poland-102224>
- Directorate-General for Climate Action. 2022. Poland and the European Green Deal – Climate and energy targets in Poland. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission. 2019. Communication from the Commission: The European Green Deal. Brussels, Belgium: European Commission.
- Beyond Fossil Fuels. 2024, Januari. Beyond Fossil Fuels Report. Europe's Coal Exit: Overview of National Coal Phase Out Commitments. Retrieved from Beyond Fossil Fuels database.
- Climate Change Performance Indeks. 2022. CCPI Report. Poland Performance Index on Climate Change. Retrieved from CCPI database.
- European Court of Auditors. 2022. Special Report. EU support to coal regions Limited focus on socio-economic and energy transition. Retrieved from ECA database.
- Rogalski, Tomasz. 2023. NRF Publication. Global offshore wind: Poland. Retrieved from Norton Rose Fulbright database.